

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang pantai kurang lebih 81.000 km, seharusnya mampu menjadi negara produsen garam untuk kebutuhan masyarakat bahkan untuk mengekspor garam ke luar negeri. Garam adalah salah satu komoditas penting yang memiliki potensi sangat besar apabila dikelola dengan baik. Saat ini garam sebagai komoditas penting dan strategis belum memiliki komoditas substitusi. Garam juga merupakan bahan pokok yang sangat diperlukan dalam berbagai jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan konsumsi hingga industri. Garam memiliki pembagian berdasarkan Kualitas Produksi atau KP yang terdiri dari KP 1 dan KP 2. KP 1 yaitu jenis garam yang memiliki kadar NaCl paling rendah 94,7% memiliki warna putih bening dan bersih dan memiliki harga terendah yaitu Rp 750.000 per ton. Sementara garam KP 2 yaitu jenis garam yang memiliki kadar NaCl berkisar antara 85% - 94,7% memiliki warna putih dengan harga terendah yaitu Rp 550.000 per ton.¹

Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah keseluruhan produksi garam nasional pada tahun 2020 sekitar 3 juta ton dan target pada 2021 yaitu 3,1 juta ton. Akan tetapi karena kendala kondisi alam yang tidak mendukung karena curah hujan, maka produksi

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2016, *Garam*, diakses pada 26 Januari 2022, <http://bappeda.jatimprov.go.id/2016/03/18/garam/>.

garam hanya memperoleh angka 1,3 juta ton pada tahun 2021. Yang menjadi produsen garam nasional adalah PT Garam selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang produksi garam dan Garam Rakyat yang dikelola oleh masyarakat atau Badan Usaha Swasta.²

Berdasarkan data diperoleh, produksi garam rakyat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 600.000 ton dari target awal 1,2 juta ton. Di Jawa Timur, daerah penghasil garam terbesar yaitu Pulau Madura yang menyumbang hampir 80% jumlah produksi garam di Jawa Timur. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Salah satu pusat penghasil garam yang ada di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sampang. Petani garam di Kabupaten Sampang dapat menghasilkan kurang lebih 60% garam yang berlokasi di 5 kecamatan yakni Kecamatan Pengarengan, Sreseh, Jrengik, Camplong, dan Sampang. Kabupaten Sampang merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas tambak garam terbesar yaitu kurang lebih 5.545 Ha yang sebagian besar terletak di Kecamatan Pangarengan. Menurut data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sampang, hasil produksi garam di Kabupaten Sampang sepanjang tahun 2021 memperoleh angka 87.000 ton. Hal ini merupakan penurunan yang cukup drastis apabila dibandingkan dengan tahun produksi 2019 – 2020 yang mendapatkan garam sebanyak 235.000 ton. Faktor yang sangat mempengaruhi menurunnya hasil produksi garam di Kabupaten Sampang adalah faktor cuaca yang tidak mendukung dan juga faktor terbesar yaitu merosotnya harga

² Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021, *Pemerintah Bahas Berbagai Upaya Tingkatkan Produksi Garam Nasional*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://maritim.go.id/pemerintah-bahas-berbagai-upaya-tingkatkan-produksi-garam-nasional/>.

garam sepanjang tahun 2021. Menurunnya produksi garam di Kabupaten Sampang salah satunya disebabkan petani atau pengelola garam khawatir untuk menjual maupun memproduksi garam dengan jumlah yang besar karena harga yang sangat rendah dan dapat merugikan pihak pengelola maupun petani garam hingga ratusan juta rupiah. Jika dilihat, produksi garam di Indonesia sangat minim padahal garam merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan. Seharusnya hal tersebut dapat bermanfaat bagi para petani garam maupun pengusaha garam untuk dapat meningkatkan produksinya lebih banyak. Akan tetapi, untuk melakukan peningkatan produktivitas tersebut para petani garam maupun pengusaha garam memiliki beberapa permasalahan. Menurut Suherman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) mengatakan jika kendala yang dirasakan oleh petani garam secara tingkat nasional yaitu pertama, kelembagaan garam yang masih lemah. Kedua, infrastruktur dan fasilitas untuk produksi yang terbatas. Ketiga, modal yang sangat kecil yang dimiliki oleh petani garam. Keempat, beberapa regulasi yang dirasa tidak berpihak pada petani garam. Kelima, sistem perdagangan yang dirasa tidak memberikan keuntungan bagi petani garam. Keenam, permintaan mutu dan kualitas yang tidak sesuai. Dan ketujuh, cuaca yang tidak pasti.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya dihadapi oleh petani garam di tingkat nasional tetapi juga dihadapi oleh petani garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Para petani garam sangat minim dalam hal permodalan, oleh karena itu kebanyakan petani meminjam modal atau mencari bantuan modal kepada para tengkulak garam. Alasan petani meminjam modal kepada tengkulak garam dikarenakan sistem peminjaman yang praktis dan

prosesnya cepat tanpa memakan waktu yang panjang. Cara tersebut padahal dapat membuat petani menjadi adanya keterikatan dengan tengkulak tersebut. Selain permasalahan modal, petani garam di Kecamatan Pangarengan juga memiliki permasalahan dalam hal sistem perdagangan yang menurut mereka tidak menguntungkan. Harga garam beryodium untuk konsumsi seharga 800 rupiah hingga 1.000 rupiah untuk per gramnya tetapi di tingkat produsen tepatnya di Pangarengan harga garam tersebut hanya sekitar 300 rupiah hingga 400 rupiah saja untuk per kilogramnya. Besarnya margin pemasaran yang terlihat dalam penjualan garam rakyat di Kecamatan Pangarengan³. Permasalahan tata niaga garam tersebut sebenarnya telah di jawab oleh pemerintah dengan dibuatnya regulasi kebijakan terkait tata niaga garam, tetapi regulasi yang dibuat oleh pemerintah hanya mengatur tentang hal impor garam saja, sedangkan pembahasan terkait garam rakyat tidak dijelaskan secara rinci

Petani garam selama ini tidak dapat menentukan harga jual garamnya di pasaran dikarenakan alasan petani yang ketergantungan dengan tengkulaknya. Peristiwa ini dalam tata niaga garam disebut dengan praktik kartel atau lebih jelasnya yaitu pihak berkuasa dan dapat menentukan harga. Petani garam yang memiliki hutang dengan tengkulak akhirnya tidak mempunyai jalur pemasaran alternatif. Sistem tersebut biasanya disebut dengan sistem ijon yang mana sistem tersebut dapat terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu petani dan tengkulak. Sistem ijon digunakan oleh tengkulak karena petani garam

³ Manda, A., Triana, D., & Ebban, K., 2016, *Pemasaran Garam Rakyat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang*, Agritrop Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, hal. 222-223.

membutuhkan uang diawal untuk keperluan modal sehingga dua pihak tersebut secara tidak langsung memiliki keterikatan untuk menjual garam yang siap panen dengan harga yang telah ditentukan sepihak.⁴

Masa produksi garam selama setahun maksimal hanya selama 6 (enam) bulan saja, itu pun dapat berkurang jika cuaca tidak stabil atau musim hujan lebih lama dari waktu biasanya. Dalam produksi garam sumber yang sangat diandalkan yaitu sinar matahari, maka dari itu pengusaha garam ini sangat bergantung kepada iklim dan keadaan tanah. Oleh karena itu, tidak semua garis pantai bisa digunakan untuk memproduksi garam. Biasanya selama musim hujan para petani garam mengganti profesinya sebagai pengusaha ikan yang jika dilihat keuntungannya tidak seberapa dibandingkan dengan usaha garam.⁵ Jika ditarik kesimpulan dalam memproduksi garam sangat diperlukan usaha yang sangat besar karena masyarakat di Kecamatan Pangarengan memproduksi garam masih menggunakan cara-cara tradisional yaitu memanfaatkan sinar matahari. Tetapi keuntungan yang mereka dapatkan sangat tidak sebanding dengan sulitnya pembuatan garam tersebut. Harga yang ditentukan oleh para tengkulak dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani garam, ditambah lagi masa produksi dan panen garam yang tidak menentu menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan.

Faktor lain yang menjadi sorotan terkait dengan kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sampang yaitu regulasi mengenai impor garam. Regulasi tersebut menjadi salah satu factor yang membuat adanya ketidakseimbangan antara garam

⁴ Prasetyo, N., Aprilina, S., Darul, I., 2020, *Mengkaji Sistem Pemasaran Garam Di Madura*, Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 15, No. 1, hal. 111-122.

⁵ Ihsanuddin, & Sukmo, P., 2020, *Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat*, UTM PRESS: Universitas Trunojoyo Madura.

industry dan garam lokal. Garam yang diproduksi oleh masyarakat di Kabupaten Sampang masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga pada proses penjemuran tersebut dapat mengurangi kualitas garam. Hingga saat ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi masih belum memberikan akomodasi terkait industrialisasi garam kepada petani garam di Pulau Madura. Oleh karena itu, hingga sekarang tidak ada teknologi untuk memproduksi garam di Madura. Hal tersebut mempengaruhi kualitas garam yang mana kualitas garam yang di produksi oleh masyarakat Madura tidak memenuhi standar yakni kandungan NaCl 97%, hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan garam dilakukan di atas tanah sampai akhirnya masa panen. Kualitas garam yang telah tercampur tanah dan kotoran tersebut menjadi sangat rendah, kualitas yang rendah itulah membuat harga garam di pasaran menjadi rendah.⁶

Awal diluncurkannya Peraturan No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dijalankan, untuk dapat bersaing dengan garam industry disayangkan pihak pemerintah masih belum memberikan sebuah solusi kepada petani-petani garam di Madura. Pemerintah juga masih belum memberikan teknologi untuk membantu memproduksi garam agar kualitasnya lebih baik. Regulasi mengenai impor tersebut mengakibatkan kekhawatiran bagi para petani garam karena mereka beranggapan bahwa adanya regulasi tersebut membuat harga garam lokal semakin turun dan dapat megancam mata pencaharian mereka

⁶ Maulin, N., 2020, *Gerakan Sosial Petani Garam Sumenep-Madura Terhadap Polemik Kebijakan Impor Garam*, Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Airlangga, hal. 6.

sebagai petani garam nantinya. Jika hal tersebut terjadi akan meningkatkan angka kemiskinan di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Sampang. Madura yang disebut-sebut sebagai pulau penghasil garam ini sangat disayangkan hal itu tidak dapat menjadikan Negara Indonesia mencapai swasembada.⁷

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Sampang, total jumlah penduduk sebanyak 989.001 jiwa yang sebagian besar memiliki profesi sebagai petani. Profesi petani ini harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah daerah hingga pemerintah provinsi agar dengan segera petani dapat berpindah dari sistem tradisional menjadi sistem modern untuk bisa bersaing dengan garam industri, berinovasi, dan berkembang lagi. Kesejahteraan para petani garam juga tidak boleh dikesampingkan, hal tersebut menjadi pengaruh yang cukup besar bagi meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Pangarengan. Jika pemerintah tidak cepat dalam mengambil tindakan dan memberikan solusi atas keresahan seluruh petani garam di Kabupaten Sampang hingga di Madura, maka satu persatu para petambak garam akan berganti profesi dan memilih untuk bekerja serabutan. Selama satu dekade terakhir, harga eceran terendah (HET) selalu menurun hal ini dipastikan dapat merugikan para petani garam karena biaya dalam produksi garam tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para petani garam.⁸

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Maulin Nikmah, dalam skripsinya yang berjudul “*Gerakan Sosial Petani Garam Sumenep-Madura*

⁷ *Ibid.*, hal 7.

⁸ Alfin, N., 2020, *Ini Penyebab Pulau Madura Krisis Petani Garam*, RRI Sampang, diakses pada 27 Januari 2022, <https://rri.co.id/sampang/ekonomi/899067/ini-penyebab-pulau-madura-krisis-petani-garam>.

Terhadap Polemik Kebijakan Impor Garam”. Penelitian ini berfokus pada gerakan sosial yang dilakukan oleh petani garam dan juga organisasi yang terlibat yaitu Asosiasi Masyarakat Petani Garam (AMPG) yang berada di Kabupaten Sumenep Madura. Dijelaskan dalam skripsinya, bahwa anjloknya harga garam dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri. Gerakan sosial yang dilakukan para petani garam tersebut salah satunya dengan melakukan demo di depan Kantor Gubernur Jawa Timur pada 2019 meski masih belum membuahkan hasil. Berdasarkan tujuan penelitian skripsi tersebut, Maulin menyatakan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui proses terbentuknya gerakan sosial petani garam di Sumenep, mengetahui strategi gerakan sosial yang dilakukan oleh AMPG dan HMPG, serta mengetahui solusi dari pemerintah dalam merespon gerakan sosial tersebut.

Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa dalam melakukan gerakan sosial untuk mencapai kepentingan para petani garam terdapat Asosiasi Masyarakat Petani Garam (AMPG) yang membantu dalam proses gerakan tersebut. Organisasi tersebut merupakan kelompok kepentingan yang paling konsisten dalam memperjuangkan hak-hak petani garam khususnya di Kabupaten Sumenep.⁹ Penelitian yang dilakukan Maulin tersebut memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai gerakan sosial petani garam dalam memperjuangkan kesejahteraannya. Berdasarkan *review* yang dilakukan oleh

⁹ Maulin, N., *Op. Cit.*

Penulis, penelitian ini memiliki kekurangan pada bagian abstrak yang tidak menjelaskan mengenai hasil penelitian secara lengkap. Seharusnya dalam abstrak dijelaskan hasil penelitian yang menjawab dari rumusan masalah penelitian agar pembaca dapat mengetahui secara singkat hasil penelitian tersebut dengan membaca abstrak penelitian.

Selain itu, terdapat penelitian yang sama tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh buruh. Penelitian ini dilakukan oleh Arif Rahman Hakim dengan judul “*Gerakan Serikat Pekerja Kota Surabaya dalam Memperjuangkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*”. Penelitian ini berfokus pada gerakan sosial yang dilakukan oleh buruh dalam merespon kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Gerakan buruh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) muncul dilatar belakang oleh kekecewaan dan ketidakpuasan pada kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. FSPMI menggunakan strategi konsep *lobby* aksi dengan melakukan *lobby* kepada pemerintah daerah yang sebelumnya FPSMI bersama buruh lainnya membuat *draft* yang berisikan gambaran yang terjadi di lapangan, solusi terhadap problematika yang terjadi, serta pasal apa saja yang dianggap efektif dalam mengatasi permasalahan.

Hasil penelitian ini menyebutkan jika gerakan buruh merupakan alat dan bentuk strategis yang bermanfaat sebagai kontrol sosial dan bermanfaat untuk menekan kebijakan politik penguasa secara sosial agar kebijakan tersebut lebih pro kepada buruh. Dapat dikatakan bahwa gerakan buruh termasuk gerakan yang kuat,

dengan menetapkan isu strategis sebagai agenda perjuangan bersama.¹⁰ Penelitian yang dilakukan Arif memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai gerakan sosial yang dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dianggap hanya menguntungkan sebelah pihak. Perbedaan yang ditemukan dalam gerakan ini yaitu gerakan buruh FSPMI juga memanfaatkan media sosial untuk mengkampanyekan mengenai perjuangan Perda ini sangatlah penting untuk kesejahteraan buruh. Sedangkan pada penelitian penulis gerakan petani FPGM tidak memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat umum agar mengerti bagaimana nasib petani garam saat ini. Hal ini lah yang membuat masyarakat minim pengetahuan mengenai kesejahteraan petani garam lokal karena jarang terekspos media.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok buruh yang tergabung dalam FSPMI juga diteliti oleh Ummu Salama dalam skripsinya yang berjudul “*Buruh dan Gerakan Sosial: Studi Tentang Demoktasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam Menyikapi Kebijakan Pemerintah Provinsi Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sidoarjo*”. Keduanya sama-sama membahas gerakan sosial yang dilakukan buruh yang tergabung dalam FSPMI untuk memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Regional, namun perbedaannya terletak pada daerahnya. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan para buruh dijalankan secara terstruktur dengan pertama yaitu melakukan

¹⁰ Arif Rahman Hakim, 2017, *Gerakan Serikat Pekerja Kota Surabaya dalam Memperjuangkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*, Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Airlangga.

rapat koordinasi dengan pengurus FSPMI yang berasal dari pimpinan wilayah dari provinsi. Setelah proses tersebut, tahap selanjutnya yaitu dengan menyampaikan hasil rakor tersebut kepada pemerintah untuk dilakukan lobi. Apabila lobi tidak memperoleh kesepakatan, maka terjadi langkah ketiga yaitu aksi atau demonstrasi. Dampak setelah demo tersebut yaitu terjadinya pengurangan karyawan yang diputuskan oleh perusahaan dan adanya kenaikan upah 30% dari sebelumnya.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan Ummu Salamah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada gerakan sosial yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari buruh dan petani garam. Sementara perbedaannya terletak pada hasil gerakan sosial yang dilakukan. Pada gerakan sosial yang dilakukan buruh FSPMI berakhir dengan adanya PHK sebagian buruh oleh perusahaan, sementara hal tersebut tidak terjadi pada petani garam sebab mereka sendiri yang merupakan pemilik usaha pergaraman. Dari hal ini diketahui bahwa buruh memiliki resiko yang tinggi untuk diPHK dalam melakukan suatu gerakan seperti aksi demo ataupun mogok kerja, dikarenakan buruh memiliki keterikatan dengan perusahaan.

Gerakan sosial tidak hanya terjadi pada pekerjaan buruh maupun petani tetapi juga dapat dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Seperti pada penelitian yang dibuat oleh Idil Akbar yang berjudul "*Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)*". Penelitian ini berfokus pada fenomena gerakan mahasiswa dalam upaya melaksanakan

¹¹ Ummu Salamah Nurlayl, 2015, *Buruh dan Gerakan Sosial : Studi Tentang Demonstrasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Dalam Menyikapi Kebijakan Pemerintah Provinsi Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Pada Program Studi Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

demokratisasi di Indonesia. Akbar menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa ini memiliki ciri khas yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitar. Gerakan mahasiswa juga digolongkan sebagai kekuatan moral dikarenakan mahasiswa memiliki komitmen murni terhadap moral berdasarkan kesehariannya dalam mencari dan menemukan kebenaran melalui ilmu pengetahuan yang merupakan sadar politik mahasiswa. Kemurnian sikap dan tingkah laku yang dilakukan mahasiswa membuat mahasiswa dengan sendirinya memerankan politik moral.¹²

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan salah satu tolak ukur penting dalam keberhasilan bagi perjalanan menuju negara yang demokrasi. Gerakan mahasiswa juga dituntut untuk konsisten menjalankan idealismenya yakni kepentingan masyarakat luas terutama dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar hanya menjelaskan seperti apa fenomena gerakan mahasiswa dan pentingnya gerakan mahasiswa bagi demokrasi di Indonesia, penelitian ini tidak menyebutkan isu-isu besar yang melibatkan gerakan mahasiswa. Penelitian ini tentu memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dikarenakan adanya gerakan sosial ini merupakan bentuk dari berjalannya demokrasi di Indonesia. Walaupun strategi gerakan yang dilakukan mahasiswa dan petani hampir sama tetapi tentu strategi yang dilakukan mahasiswa lebih modern karena saat ini mahasiswa tidak hanya melakukan aksi demo tetapi juga

¹² Idil Akbar, 2016, *Demokrasi dan Gerakan Sosial: Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2.

memanfaatkan media sosial dalam merespon problematika yang terjadi di lingkungannya.

Terdapat pula penelitian mengenai gerakan sosial yang ditengah prosesnya bertransformasi menjadi gerakan sosial politik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Alifia Imananda Putri yang berjudul “*Gerakan Sosial Politik Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*”. Penelitian ini menjelaskan munculnya sengketa tanah antara masyarakat Dusun Mandiku Kabupaten Jember dengan BUMN Perum Perhutani. Masyarakat Mandiku melalui wadah organisasi bernama Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) berupaya untuk memperjuangkan tanah yang telah diakui oleh Perum Perhutani. Menurut Alifia, gerakan sosial ini berubah menjadi gerakan sosial politik karena beberapa anggota P3MU sudah mulai memiliki akses politik dan beberapa tergabung di partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan petani bukan lagi terjadi diakibatkan dari hubungan eksploitatif tetapi juga karena adanya keterbukaan sistem yang memberikan kesempatan kepada petani untuk melakukan pergerakan. Hasil dari proses gerakan ini, P3MU memiliki akses politik dan mendapat respon dari pemerintah pusat.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dibuat penulis dalam hal adanya akses politik yang dimiliki kelompok yang melakukan gerakan sosial. Diketahui bahwa FPGM juga memiliki akses politik ke pemerintah namun tidak terlalu signifikan dalam membantu sebab bukan dari anggota internal FPGM. Hal ini membuat kepentingan dari FPGM tidak dapat tersalurkan dengan optimal,

berbeda dengan P3MU yang memiliki akses politik yang cukup besar sehingga mampu memperoleh respon dari pemerintah pusat.¹³

1.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strategi gerakan sosial yang dilakukan petani garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura dalam mewujudkan kesejahteraannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pembentukan dan strategi gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi yang dibentuk oleh petani garam di Kabupaten Sampang Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi diberbagai bidang khususnya dibidang ilmu politik. Peneliti menggunakan salah satu teori yang telah didapatkan dalam studi ilmu politik pada penelitian ini. Peneliti sangat berharap hasil dari penelitian ini mampu memberikan wawasan serta berbagai informasi berhubungan dengan ilmu politik khususnya dalam teori terkait gerakan sosial. Penelitian ini akan membahas mengenai gerakan sosial petani garam di Kabupaten Sampang Madura terhadap adanya sistem monopoli yang dilakukan tengkulak. Hal tersebut pastinya akan berhubungan dengan teori kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak lain.

1. Bagi Penulis

¹³ Alifia Imananda Putri, 2017, *Gerakan Sosial Politik Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*, Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Penulis mendapatkan banyak manfaat dari penelitian ini khususnya dalam hal mengimplementasikan suatu teori yang digunakan. Oleh karena itu penulis akan mendapatkan wawasan terkait kesadaran politik dan mendapatkan informasi terbaru.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini adalah tema yang baru sehingga akan menjadi hal yang menarik bagi akademisi untuk didiskusikan karena jarang sekali ditemukan penelitian yang berkaitan dengan kesejahteraan petani garam khususnya di Pulau Madura.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu agar masyarakat memiliki kesadaran dan dapat memahami pentingnya memperjuangkan hak-hak rakyat kecil khususnya hak petani garam. Sehingga harapannya tidak terdapat lagi kebijakan-kebijakan yang dipolitisasi untuk suatu kepentingan tertentu.

1.5 Kerangka Teori

Setiap individu maupun kelompok memiliki gagasan tertentu yang berisi tentang preferensi politik dan hal tersebut dicerminkan dalam perilaku politik. Perilaku politik merupakan bagian dari partisipasi politik, partisipasi politik sendiri adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan keputusan politik.¹⁴ Pada studi ilmu politik banyak sekali ditemui teori-teori gerakan sosial. Gerakan sosial yang dilakukan para petani garam cocok dengan

¹⁴ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, Hal. 140-141.

teori gerakan sosial menurut Sidney Tarrow. Peneliti akan mendefinisikan teori gerakan sosial menurut Sidney Tarrow. Gerakan sosial sebenarnya tidak dapat diartikan dengan tunggal, akan tetapi gerakan sosial memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan melakukan tindakan kolektif. Seperti penjelasan gerakan sosial yang merupakan tindakan kolektif secara terorganisir yang memiliki ruang lingkup yang luas, menggunakan cara-cara yang jelas, mempunyai tujuan serta menggunakan cara yang institusional.¹⁵ Gerakan sosial yang dilakukan oleh para petani terkait kasus perlawanan sebenarnya tindakan tersebut disebabkan oleh adanya peranan negara yang dianggap terlalu luas dalam proses transformasi pedesaan. Hal dasar pada tradisi klasik yaitu sebagian banyak studi pada perilaku kolektif diarahkan dalam berbagai bentuk perilaku kelompok kerumunan yang disebut *crowd*, dan *crowd* disini adalah kolektivitas yang liar dan rasional yang terlihat dalam berbagai tindakan diantara lain kerusuhan, keributan, huru-hara, kerisauan, hingga pemberontakan.¹⁶ Fenomena gerakan sosial yang telah dilakukan oleh petani garam dan beberapa organisasi petani garam ini memiliki kesamaan dengan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Sidney Tarrow dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti mengartikan teori-teori gerakan sosial dari Sidney Tarrow sebagai berikut;

1.5.1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial masih tidak dapat didefinisikan secara tersendiri, akan tetapi gerakan sosial memiliki kepentingan dan tujuan yang sama melalui tindakan yang

¹⁵ Wilson dalam Soenyono, 2005, *Teori-Teori Gerakan Sosial*, Surabaya: Yayasan Kampusiana, Hal. 2.

¹⁶ Joni Rusmanto, 2012, *Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahan*, Zifatama Publishing, Hal. 6-7.

dilakukan secara bersama-sama diluar dari lingkup lembaga yang mampu. Tujuan yang bersama diinginkan oleh suatu kelompok individu yang bermaksud untuk menunjukkan sikap tidak puas di depan umum dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengganti dasar dari sosial dan politik yang dianggap tidak memuaskan.¹⁷ Gerakan sosial menurut teori adalah sebuah tindakan yang bermula dari adanya ketidak puasan atas prakarsa masyarakat dan masyarakat melakukan tindakan-tindakan untuk meminta suatu perubahan dalam lembaga, suatu kebijakan, maupun di pemerintahan. Tuntutan perubahan yang diajukan masyarakat biasanya dikarenakan adanya kebijakan yang bertentangan dengan kehendak sebagian masyarakat. Pada beberapa literatur mengenai definisi gerakan sosial terdapat pihak yang mengartikan bahwa gerakan sosial bisa dikatakan sebuah gerakan yang bersifat anti pemerintah ataupun juga pro pemerintah. Sehingga ini artinya tidak selalu gerakan sosial bersumber dari masyarakat namun juga bisa dari hasil rekayasa penguasa atau pejabat pemerintah.¹⁸

Menurut Sidney Tarrow menyebutkan jika gerakan sosial adalah sebuah tantangan kolektif yang berbasis pada kepentingan bersama dan solidaritas sosial untuk melawan elit.¹⁹ Peneliti memperhatikan jika gerakan sosial ini bermula dari adanya kesamaan nasib yang bersama-sama ingin ada perubahan yang lebih baik. Dari pengertian tersebut, gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai gerakan yang dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan kepentingan bersama. Tarrow

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 326.

¹⁸ Juwono Sudarsono, 1976, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta: Gramedia, Hal. 24-25.

¹⁹ David S. Meyer dan Sidney G. Tarrow, 1998, *The Social Movement Society: Contentious Politics for A New Century*, Maryland, Amerika Serikat: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

menyebutkan jika politik perlawanan ini didasari oleh gerakan atau tindakan kolektif yang bersifat perlawanan. Gerakan kolektif memiliki beberapa bentuk yakni tindakan berkelanjutan, terlembagakan, serta tindakan jangka pendek. Kebanyakan tindakan dibuat kepada pihak lembaga atau institusi yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan dalam memberikan perubahan kebijakan. Tindakan yang dilakukan secara bersama-sama ini bersifat melawan tetapi juga memberikan solusi yang berisi suatu perubahan. Gerakan sosial sebenarnya berbasis perlawanan dikarenakan kelompok masyarakat dapat membuat kekuatan yang dapat melawan rezim dan juga dapat membuat suatu perubahan.²⁰

Klandermans mengutip kembali pendapat dari Sidney Tarrow yang menyebutkan jika gerakan sosial merupakan penentangan atau perlawanan kolektif yang dilakukan oleh orang-orang memiliki rasa solidaritas serta tujuan yang sama pada proses interaksi yang sering dilakukan dengan pihak elite, pihak lawan, dan juga pihak yang memiliki wewenang. Dari pendapat Sidney Tarrow tersebut dapat dieborasikan;²¹

- (1) Suatu gerakan merupakan tindakan perlawanan/pertentangan yang ditujukan kepada elite.
- (2) Gerakan dilakukan atas klaim nama dan pihak lawan yang sama.
- (3) Gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan tujuan yang sama.
- (4) Dalam meneruskan tujuan tindakan kolektif maka pertarungan diganti kedalam gerakan sosial.

²⁰ Sidney Tarrow, 1998, *Power in Movement, Social Movement and Contention Politics*, Cambridge: University Press, Hal. 4.

²¹ Oman Sukmana, 2016, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, Hal. 28-29.

1.5.1.1. Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru

Seiring dengan berkembangnya studi, gerakan sosial menjadi bermacam-macam bentuknya. Pada umumnya gerakan sosial dilihat dari empat aspeknya yang mana empat aspek tersebut dapat digunakan dalam mempelajari karakteristik secara khusus di dalam gerakan sosial lama atau gerakan sosial baru, yakni :²²

1. Ideologi atau Tujuan

Gerakan sosial pada prinsipnya mempunyai tujuan, akan tetapi gerakan sosial lama maupun gerakan sosial baru memiliki perbedaan dalam tujuannya. Hal ini dikarenakan gerakan sosial baru berfokus pada gaya hidup dan kualitas. Sehingga tujuan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan gerakan sosial lama yang mana menjelaskan tujuannya yakni adanya keterpurukan serta juga deprivasi.

2. Taktik

Taktik atau yang biasa disebut dengan strategi pada gerakan sosial baru maupun gerakan sosial lama juga memiliki perbedaan. Pada gerakan sosial baru waktunya lebih fleksibel dan lebih memanfaatkan teknologi seperti membuat sebuah petisi online, atau juga penggunaan hashtag, dll. Sedangkan pada gerakan sosial lama ini bersifat kontroversial contohnya yakni mengadakan aksi secara langsung di depan Gedung-gedung, dll.

3. Struktur

Dalam struktur gerakan sosial baru maupun gerakan sosial lama juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut yaitu pada gerakan sosial baru

²² *Ibid.*, Hal. 119.

strukturnya tidak menonjol atau bahkan struktur organisasinya tidak jelas. Sedangkan pada gerakan sosial lama pada struktur organisasinya terdapat seorang pemimpin dan struktur tersebut jelas serta paten.

4. Partisipasi dari Gerakan

Di dalam aspek ini terdapat perbedaan yang signifikan diantara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama berfokus kepada partisipasi yang hadir secara langsung. Sedangkan gerakan sosial baru berfokus kepada partisipasi yang tidak perlu hadir secara langsung dalam melakukan gerakan sosialnya.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah suatu wujud aksi kolektif yang memiliki tujuan untuk mewujudkan reorganisasi sosial yang dilaksanakan terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Gerakan sosial diartikan dalam bentuk protes kepada pemerintah yang terbukti dan dianggap telah membuat kebijakan yang merugikan masyarakatnya. Sebagaimana menurut Wahyudi, bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok orang secara kolektif, berkelanjutan, dan sistematis yang memiliki tujuan untuk mendukung keberlakuan tata kehidupan tertentu, serta kepentingan secara individu, kelompok, komunitas, atau tingkatan lebih luas.²³

Konsep gerakan sosial yang digunakan yaitu konsep dari gerakan sosial oleh Sidney Tarrow karena menurut peneliti konsep tersebut berfokus kepada aspek

²³ Wahyudi, 2005, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Masyarakat: Studi Kasus Reklaming/Penjarahan Atas Tanag PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*, Malang: UMM Press, Hal. 5.

politik dan aspek sosial. Gerakan sosial sendiri diartikan sebagai kegiatan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat biasa dan bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat atau juga kelompok yang mempunyai pengaruh cukup besar pada kepentingannya. Nantinya kelompok tersebut atau biasanya disebut aliansi dapat menjadi sebuah lawan yang sangat kuat dan juga dapat mempunyai akses dalam menyampaikan aspirasinya atau protesnya kepada pihak pemerintah.

Bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh Petani Garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang Madura yaitu gerakan sosial lama. Gerakan sosial lama pada prinsipnya mempunyai ideologi atau tujuan untuk mengubah suatu kondisi yang berkaitan dengan deprivasi relatif dan keterpurukan. Kemudian taktik yang dijalankan oleh petani garam cenderung bersifat umum misalnya dengan mengadakan gerakan turun ke jalan. Sedangkan dari sisi struktur gerakan sosial ini mempunyai struktural yang jelas dengan adanya organisasi seperti Forum Petani Garam Madura. Pada sisi partisipasi, pada gerakan ini mempunyai partisipan atau massa yang jelas sebab diharuskan untuk melaksanakan pertemuan secara langsung.

1.6.2. Petani Garam

Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat) dengan resiko yang ditanggung sendiri dan bertujuan untuk dijual. Petani disini dapat dikategorikan sebagai petani pemilik ataupun petani penggarap (sewa atau bagi hasil).²⁴ Definisi petani menurut Eric R.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Istilah*, diakses pada 2 Juli 2022, <https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bber>.

Wolf yaitu penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam proses cocok tanam dan membuat keputusan tentang proses tanam secara otonom. Kategori tersebut dengan demikian mencakup penggarap atau penerima bagi hasil ataupun pemilik penggarap selama mereka berada pada posisi pembuat keputusan yang berkaitan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Definisi tersebut lebih berfokus pada aktifitas seseorang yang secara nyata melakukan cocok tanam dan membuat keputusannya sendiri dalam proses tersebut. Oleh karenanya, Eric R. Wolf tidak memasukkan buruh tani karena dianggap sebagai pekerja yang tidak memiliki hak membuat keputusan atas tanaman.²⁵

Petani atau petambak garam menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 1 Angka 14 adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. Dalam angka 16 di pasal yang sama menjelaskan bahwa petani atau petambak garam juga dapat bertindak sebagai penggarap tambak garam dengan menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman. Dalam angka 17 di pasal yang sama juga menjelaskan bahwa petani atau petambak garam juga dapat bertindak sebagai pemilik tambak garam sehingga memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman.²⁶

²⁵ Coki Siadari, 2015, *Pembahasan Mengenai Pengertian Petani Menurut Para Ahli*, diakses pada 2 Juli 2022, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-petani-menurut-para-ahli.html?m=1>.

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.

1.6.3. Harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut bagi seseorang atau kelompok orang pada waktu dan tempat tertentu. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dihubungkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan perbandingan produk sejenis.²⁷ Menurut Philip Kotler harga adalah jumlah uang yang ditetapkan oleh produsen barang atau jasa untuk dibayarkan oleh konsumen guna menutupi biaya produksi, distribusi, dan jualan pokok termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan resikonya.

Menurut Husein Umar, keputusan-keputusan tentang harga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu,²⁸

a. Faktor Internal

Keputusan harga disesuaikan dengan sasaran pemasaran seperti misalnya sasaran untuk bertahan hidup memaksimalkan keuntungan jangka pendek, memaksimalkan pangsa pasar.

b. Faktor Eksternal

Keputusan harga disesuaikan dengan pasar dan permintaan konsumen. Oleh karena itu, sebelum menetapkan harga harus dipahami terlebih dahulu hubungan antara harga dan permintaan terhadap barang atau jasa baik untuk jenis pasar yang berbeda maupun persepsi konsumen. Faktor eksternal lainnya yaitu kondisi ekonomi

²⁷ Ade Syarif Maulana, 2016, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. TOI*, Jurnal Ekonomi, Hal. 119, Vol. 7, No. 2.

²⁸ *Ibid.*

makro seperti tingkat inflasi biaya bunga, resesi, dan keputusan pemerintah.

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

1.7.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses kemunculan dan pembentukan gerakan sosial petani garam di Kabupaten Sampang hingga proses dalam melakukan gerakan sosial. Lalu melihat bagaimana hasil yang telah dilakukan melalui respon dari pihak pemerintah.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang yang merupakan penghasil garam terbesar di Pulau Madura serta sebagian besar masyarakat yang memiliki mata pencaharian petani garam yang berada di Kabupaten Sampang terletak di Kecamatan Pangarengan.

1.7.3. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe interpretative dikarenakan tipe penelitian ini dapat membantu penulis untuk melihat fenomena serta dapat lebih menguasai penelitian yang akan diteliti. Menurut Lisa Harrison, penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis perilaku serta sikap politik yang tidak dapat dikuantitatifkan. Secara garis besar penelitian akan dilakukan dengan observasi langsung, mewawancarai subyek penelitian untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini.²⁹

²⁹ Lisa Harrison, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 86.

1.7.4. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini merupakan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Subyek penelitian diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang akurat dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Teknik penelitian ini digunakan saat sudah ada pemahaman terhadap informasi tentang objek penelitian maupun subjek penelitian.³⁰ Berikut ini merupakan subyek untuk memenuhi syarat data pada penelitian, dimulai dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan menjelaskan mengenai Raperda tentang Perlindungan Petani Garam serta pihak-pihak lainnya yang ada pada daftar subyek penelitian berikut :

Tabel 1. Subjek Penelitian

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur	Subjek penelitian ini tertuju kepada Bapak Sw Nugroho, S.H. sebagai anggota dari Komisi B.
3.	Forum Petani Garam Madura	Subjek penelitian ini tertuju kepada Bapak H. Jakfar Sodikin sebagai Penasehat dari Forum

³⁰ A. Black James, 1999, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 264.

		Petani Garam Madura serta Ketua APGRI.
2.	Pelaku Usaha Tambak Garam	Subjek penelitian ini tertuju kepada Bapak Moh. Aufa Marrom. Sebagai ketua Koperasi Produsen Taman Garam yang berasal dari Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang.
4.	Petani Garam	Subjek penelitian ini tertuju kepada Bapak Khalil Gibran salah satu petani garam yang ada di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung kepada para pihak-pihak terkait. Dalam menjalankan penelitian ini peneliti harus membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan-informan dalam penelitian ini, dan pada saat wawancara peneliti juga

dapat menggunakan rekaman agar data dan informasi yang disampaikan oleh informan dapat didokumentasikan dan tetap terjaga keakuratannya.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dijalankan dengan memperoleh terlebih dahulu data primer dan data sekunder. Cara memperoleh data primer yaitu dari mengumpulkan informasi secara langsung dari informan yang selanjutnya ditranskrip. Sementara data sekunder berupa data pendukung yang berbentuk dokumen. Peneliti memilih informan untuk diwawancara dalam rangka menganalisis data guna mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian peneliti melakukan penafsiran atau interpretasi temuan-temuan yang dilandasi pada landasan konsep dan teori yang peneliti gunakan. Selanjutnya metode yang peneliti gunakan yaitu metode deduktif yang didapat dari isu umum serta berdasarkan pada teori patronase yang selanjutnya dapat dibuktikan melalui temuan di lapangan.